



## Pengelolaan Rehabilitasi Sosial sebagai Strategi dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Sabrina<sup>1</sup>, Abil Al Husain<sup>2</sup>, Yos Simon Aprialdo Panggabean<sup>3</sup>, Friska Novelia<sup>4</sup>, Ivana<sup>5</sup>, Salsabilla Azzahra<sup>6</sup>, Rudy Kurniawan<sup>7</sup>, Kurnia Asni Sari<sup>8</sup>, Ilal Ilham<sup>9</sup>  
Universitas Sriwijaya, Indonesia<sup>1-9</sup>

Email Korespondensi : [ririnsabrina154@gmail.com](mailto:ririnsabrina154@gmail.com)<sup>1</sup>, [alhusainabil@gmail.com](mailto:alhusainabil@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[simonoanggabean076@gmail.com](mailto:simonoanggabean076@gmail.com)<sup>3</sup>, [friskanovelia119@gmail.com](mailto:friskanovelia119@gmail.com)<sup>4</sup>, [jjvanie18@gmail.com](mailto:jjvanie18@gmail.com)<sup>5</sup>  
[salsabzhra@gmail.com](mailto:salsabzhra@gmail.com)<sup>6</sup>, [rudykurniawan@fisip.unsri.ac.id](mailto:rudykurniawan@fisip.unsri.ac.id)<sup>7</sup>, [sarikurniaasni@gmail.com](mailto:sarikurniaasni@gmail.com)<sup>8</sup>,  
[ilalilham@fisip.unsri.ac.id](mailto:ilalilham@fisip.unsri.ac.id)<sup>9</sup>

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

### ABSTRACT

*Economic inequality remains a major social problem in Indonesia, affecting vulnerable groups. One of the government's efforts to address this issue is through a social rehabilitation program that focuses not only on restoring social functions but also on increasing the economic independence of beneficiaries. This study aims to examine the effectiveness of social rehabilitation management in increasing economic independence and examine the roles of various stakeholders in its implementation. This study used a literature review method by analyzing various scientific sources related to social rehabilitation, economic empowerment, and reducing social inequality. The results show that the success of social rehabilitation is determined not only by the provision of economic assistance but also by strengthening individual capacity through skills training, social assistance, and the development of social networks that support economic activities. From this study, it can be concluded that social rehabilitation can be an effective structural strategy in reducing economic inequality if implemented comprehensively, participatory, and sustainably, emphasizing empowerment and increasing the economic capacity of beneficiaries.*

**Keywords:** social rehabilitation, economic independence, economic inequality, social empowerment, stakeholders

### ABSTRAK

*Ketimpangan ekonomi masih menjadi salah satu persoalan sosial utama di Indonesia yang memengaruhi kelompok masyarakat rentan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui program rehabilitasi sosial yang tidak hanya berfokus pada pemulihan fungsi sosial, tetapi juga pada peningkatan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan rehabilitasi sosial dalam meningkatkan kemandirian ekonomi serta melihat peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan ketimpangan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sosial tidak hanya ditentukan oleh pemberian bantuan ekonomi, tetapi juga oleh penguatan kapasitas individu melalui pelatihan keterampilan, pendampingan sosial, serta pengembangan jaringan sosial yang mendukung aktivitas ekonomi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi*

---

*sosial dapat menjadi strategi struktural yang efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi apabila dilaksanakan secara komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan dengan menekankan pemberdayaan serta peningkatan kapasitas ekonomi penerima manfaat.*

**Kata Kunci:** *rehabilitasi sosial, kemandirian ekonomi, ketimpangan ekonomi, pemberdayaan sosial, stakeholder*

## PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah utama dalam pembangunan Indonesia. Meskipun ekonomi nasional mengalami pertumbuhan yang cukup stabil, pembagian kesejahteraan belum merata di semua kalangan masyarakat. Ketidaksetaraan ini tidak hanya terlihat dari perbedaan pendapatan, tetapi juga tercermin dalam perbedaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, serta perlindungan sosial yang cukup. Hal ini menyebabkan kelompok masyarakat lemah sulit untuk naik secara sosial dan membuat kemiskinan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jika tidak ditangani secara menyeluruh, ketimpangan ekonomi dapat melemahkan keharmonisan sosial, meningkatkan kerentanan masyarakat, dan menghalangi terciptanya pembangunan yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan sosial, seperti program bantuan sosial dan subsidi ekonomi. Namun, pendekatan yang bersifat pertolongan sementara belum sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah mendasar karena belum mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat penerima bantuan secara optimal. Dalam hal ini, rehabilitasi sosial memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi juga pada pemulihan fungsi sosial, peningkatan kemampuan individu, serta penguatan ekonomi kelompok rentan. Oleh karena itu, pengelolaan rehabilitasi sosial yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan perlu dijadikan perhatian serius sebagai salah satu strategi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al., (2025) mengungkapkan bahwa ketimpangan sosial dan kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan memiliki banyak dimensi. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan pembagian pendapatan yang tidak merata, tetapi juga mencakup keterbatasan masyarakat dalam mengakses layanan-layanan dasar serta struktur sosial-ekonomi yang belum sepenuhnya adil. Ketimpangan dalam aspek sosial-ekonomi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah dan memperburuk pembagian lapisan sosial dalam masyarakat (Ningsih, Alpendi, & Dewi, 2024). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini. Selain itu, faktor-faktor seperti dinamika sosial-politik, kualitas pembangunan sumber daya manusia, serta ketimpangan antara laki-laki dan perempuan juga menjadi penyebab utama terjadinya ketimpangan pendapatan di Indonesia (Anti & Anis, 2025; Syafitri et al., 2025). Dalam ranah kebijakan publik, keberhasilan program-program sosial dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan

ketimpangan sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan serta ketepatan dalam menentukan sasaran program (Sarjito, 2023). Program-program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) telah terbukti memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka kemiskinan. Namun demikian, program-program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal distribusi bantuan dan keberlanjutan dampak ekonomi dalam jangka panjang (Nazwa Winaya Salsabila, 2025).

Di sisi lain, kajian mengenai rehabilitasi sosial di Indonesia cenderung lebih berfokus pada pelaksanaan program pelayanan sosial bagi kelompok-kelompok rentan, seperti gelandangan, pengemis, lansia yang terlantar, anak terlantar, dan penyandang disabilitas. Rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis tidak hanya bertujuan untuk menangani permasalahan sosial yang mereka hadapi, tetapi juga untuk membantu proses reintegrasi mereka ke dalam kehidupan ekonomi masyarakat (Fitriani, Sari, & Arafat, 2025). Sementara itu, strategi rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar lebih menekankan pada upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup melalui layanan yang terintegrasi (Rochmah, 2025). Meskipun pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar telah berjalan, program ini masih menghadapi kendala terutama terkait kondisi ekonomi dan dukungan sosial yang memadai (Sucianti, Afandi, & Kristian, 2024). Selain itu, perbedaan cara pelaksanaan rehabilitasi sosial di berbagai daerah menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat sistem manajemen dan ketersediaan sumber daya agar program dapat berjalan lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi para penerimanya (Marlinda & Hati, 2015). Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membahas tentang bagaimana pengelolaan rehabilitasi sosial dapat diintegrasikan sebagai strategi struktural dalam mengurangi ketimpangan ekonomi masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut.

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian mengenai ketimpangan ekonomi di Indonesia lebih terfokus pada analisis distribusi pendapatan, evaluasi efektivitas kebijakan fiskal, serta penilaian terhadap program-program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), sementara penelitian yang membahas rehabilitasi sosial cenderung masih terbatas pada pembahasan mengenai aspek implementasi program pelayanan bagi kelompok-kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, gelandangan, anak terlantar, dan lansia terlantar dengan fokus utama pada pemulihan fungsi sosial dan peningkatan kesejahteraan, namun demikian masih terdapat kekurangan dalam hal kajian yang secara mendalam mengkaji rehabilitasi sosial sebagai bagian dari kerangka strategis yang dapat digunakan sebagai instrumen struktural untuk menurunkan ketimpangan ekonomi, serta integrasi antara perspektif manajemen kebijakan sosial dan pendekatan rehabilitasi sosial sebagai upaya pemberdayaan ekonomi belum banyak dikaji secara komprehensif dalam menganalisis dampaknya terhadap pengurangan kesenjangan pendapatan dan peningkatan mobilitas sosial

---

masyarakat, sehingga terdapat celah penelitian yang perlu diisi baik dari segi konseptual maupun empiris terkait bagaimana pengelolaan rehabilitasi sosial dapat dirancang dan dilaksanakan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan sebagai strategi untuk mengatasi permasalahan ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan rehabilitasi sosial dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan sosial dalam rangka menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana rehabilitasi sosial memberikan kontribusi dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi kelompok-kelompok rentan di masyarakat.

## METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode kajian literatur untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang pengelolaan rehabilitasi sosial dan kontribusinya dalam mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Data yang dipakai adalah data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademis, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan rehabilitasi sosial dan kesenjangan ekonomi. Pemilihan literatur dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan topik penelitian dan tahun penerbitan dalam sepuluh tahun terakhir, sehingga sumber yang digunakan tetap relevan dan sejalan dengan kemajuan dalam kajian akademik.

Prosedur pengumpulan dan pemilihan literatur dilaksanakan dengan cara yang sistematis menggunakan kerangka PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses identifikasi, seleksi, serta analisis literatur dilakukan dengan cara yang transparan dan teratur (Page et al., 2021). Pada tahap identifikasi, peneliti melakukan pencarian literatur menggunakan berbagai basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda, serta jurnal nasional yang terakreditasi dengan memanfaatkan kata kunci yang relevan, di antaranya rehabilitasi sosial, ketimpangan ekonomi, kebijakan kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan. Dari proses pencarian tersebut, terdapat 120 artikel yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap artikel-artikel yang memiliki judul, penulis, atau konten penelitian yang serupa, sehingga dapat diidentifikasi artikel-artikel yang mengalami duplikasi. Setelah langkah penghapusan duplikasi selesai dilaksanakan, jumlah artikel yang tersisa berjumlah 80 artikel.

Langkah selanjutnya adalah melakukan skrining dengan cara meninjau judul dan ringkasan dari 80 artikel yang telah diseleksi sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti memilih artikel berdasarkan relevansinya dengan tema penelitian, yaitu yang membahas rehabilitasi sosial, kebijakan kesejahteraan sosial, dan usaha untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Artikel yang tidak berhubungan langsung dengan topik penelitian selanjutnya dihapus dari daftar tinjauan. Hasil dari proses penyaringan ini menunjukkan bahwa 45 artikel dianggap relevan dan memenuhi kriteria awal untuk analisis lebih lanjut.

---

Selanjutnya, tahap penilaian kelayakan dilakukan dengan cara membaca artikel secara mendalam untuk memastikan bahwa isi artikel tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti juga mengamati mutu sumber, kelengkapan informasi, serta keterkaitan pembahasan dengan topik penelitian. Usai melalui proses evaluasi, telah diperoleh 25 artikel ilmiah yang memenuhi semua kriteria inklusi, yang selanjutnya digunakan sebagai sumber utama dalam analisis penelitian.

Literatur yang telah dipilih selanjutnya dianalisis melalui teknik analisis isi dengan cara mempelajari, mengategorikan, membandingkan, dan menyintesis berbagai hasil penelitian sebelumnya agar dapat mengidentifikasi pola, konsep, serta model pengelolaan rehabilitasi sosial yang berkaitan dengan upaya mengurangi ketimpangan ekonomi (Snyder, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Efektivitas Pengelolaan Rehabilitasi Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi*

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa keberhasilan program rehabilitasi sosial dalam membantu penerima manfaat mencapai kemandirian ekonomi tidak hanya bergantung pada jumlah uang yang diberikan. Program tersebut juga perlu memperkuat kemampuan sosial dan budaya penerima manfaat. Menurut teori modal sosial dari Pierre Bourdieu, seseorang tidak hanya memiliki uang (modal ekonomi), tetapi juga modal sosial berupa hubungan dengan orang lain, rasa percaya diri, dan dukungan dari lingkungan sekitar yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Pendekatan kewirausahaan dalam layanan rehabilitasi sosial juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas ekonomi peserta. Program kewirausahaan yang terintegrasi dalam skema ATENSI mendorong penerima manfaat untuk membangun usaha mandiri dan menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan (Juhari & Habibullah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial yang berorientasi pada produktivitas ekonomi lebih efektif dibandingkan bantuan yang bersifat konsumtif.

Program ATENSI merupakan contoh nyata dari pendekatan ini. Program ini tidak hanya memberikan modal usaha kepada penerima manfaat, tetapi juga memberikan pendampingan dan memperkenalkan mereka kepada jaringan bisnis. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan penerima manfaat ATENSI terus berlangsung dan pendapatan mereka meningkat. Bahkan, sekitar 7,64 persen penerima manfaat berhasil berpenghasilan di atas Upah Minimum Kabupaten (Juhari & Habibullah, 2025). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa adanya dukungan dari jaringan sosial dan pendampingan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sobri et al., (2024) menunjukkan bahwa keluarga miskin yang mengikuti program rehabilitasi sosial mengalami perubahan positif bukan hanya dalam aspek keuangan, tetapi juga dalam kehidupan sosial, kondisi fisik, dan kondisi psikologis. Perubahan ini terjadi karena program tersebut

---

membantu mereka membangun hubungan sosial yang lebih luas dan mendapat dukungan dari lembaga atau organisasi yang ada di sekitar mereka.

Keberhasilan program pemberdayaan juga sangat ditentukan oleh kualitas pendampingan yang diberikan serta sejauh mana penerima manfaat bisa mengakses kegiatan ekonomi yang menguntungkan (Alfatih & Rahayu, 2025). Dalam pandangan Bourdieu, pendampingan yang diberikan dalam program rehabilitasi sosial merupakan cara untuk menambah modal sosial dan modal budaya penerima manfaat. Dengan demikian, mereka tidak hanya menerima uang, tetapi juga mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan relasi yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan usaha mereka.

Keberhasilan rehabilitasi sosial dalam meningkatkan kemandirian ekonomi sangat bergantung pada kemampuannya mengubah modal sosial menjadi modal ekonomi. Ketika hubungan sosial, rasa percaya diri, dan dukungan dari komunitas semakin kuat, penerima manfaat memiliki peluang yang lebih besar untuk mempertahankan usaha dan meningkatkan pendapatannya. Dengan demikian, rehabilitasi sosial bukan hanya memberikan bantuan sementara, melainkan merupakan cara untuk memperkuat kemampuan sosial secara berkelanjutan sehingga dampak positifnya jangka panjang.

### ***Stakeholder dalam Pengelolaan Rehabilitasi Sosial***

*Stakeholder* dalam pengelolaan rehabilitasi sosial merujuk pada berbagai pihak yang memiliki peran, kepentingan, dan tanggung jawab dalam proses pemulihan fungsi sosial individu atau kelompok yang mengalami masalah sosial. *Stakeholder* tersebut meliputi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penyedia regulasi serta anggaran, lembaga pelaksana layanan sosial yang menjalankan program rehabilitasi secara teknis, organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil yang berperan dalam pendampingan, advokasi, dan pemberdayaan, keluarga serta lingkungan sosial terdekat yang mendukung proses reintegrasi sosial, sektor swasta yang dapat memberikan peluang kerja dan dukungan ekonomi, serta akademisi yang berkontribusi melalui kajian dan evaluasi program. Keberhasilan rehabilitasi sosial sangat ditentukan oleh kerjasama antar *stakeholder* tersebut, karena masing-masing pihak saling melengkapi dalam menyediakan sumber daya, layanan, dan dukungan sosial. Tanpa kerja sama yang baik, pengelolaan rehabilitasi sosial berpotensi tidak efektif, tidak berkelanjutan, dan kurang responsif terhadap kebutuhan penerima manfaat. Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program, masih terdapat tantangan dalam koordinasi dan kesadaran masyarakat (Rochmah, 2025).

Dalam pengelolaan rehabilitasi sosial yang melibatkan berbagai pihak, terdapat berbagai *stakeholder* yang bertujuan agar dapat mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. *Stakeholder* sendiri dikategorikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu *stakeholder* kunci, primer, dan sekunder, dimana setiap kelompok ini memiliki peran, kepentingan, dan pengaruh berbeda yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan rehabilitasi (Tarigan & Wibowo, 2025). *Stakeholder* kunci, ialah mereka yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan dan pengaruh

finansial/politik yang besar. tanpa mereka, program rehabilitasi ini tidak bisa berjalan. Stakeholder kunci disini seperti dinas sosial dan pengelola panti, yang dimana mereka memiliki pengaruh strategis. Dinas sosial berfungsi sebagai regulator, pemilik anggaran, dan penentu kebijakan. Pengelola panti memiliki kewenangan sebagai pelaksana operasional di lapangan. Jika mereka tidak ada, maka program rehabilitasi ini tidak bisa berjalan, sehingga mereka dikelompokkan menjadi stakeholder kunci.

Stakeholder primer merupakan pihak yang terlibat langsung dan berdampak signifikan dalam pelaksanaan program rehabilitasi, mereka adalah pihak yang terkena dampak langsung dari kebijakan atau program itu sendiri, baik secara positif maupun negatif. Akan tetapi, stakeholder primer tidak selalu memiliki kendali atas keputusan yang dibuat. pendamping sosial dan penerima manfaat merupakan kelompok yang termasuk dalam stakeholder primer. Pendamping sosial merupakan ujung tombak yang menjalankan pembinaan dan sebagai monitoring langsung kepada penerima manfaat. Lalu, penerima manfaat sendiri adalah subjek utama yang menjadi sasaran program yang berarti eksistensi program ini ada demi mereka. Masyarakat menjadi stakeholder pendukung, karena mereka adalah pihak yang tidak terkait langsung secara teknis maupun administratif, namun memiliki kepedulian atau pengaruh terhadap keberhasilan program di lingkungan sosial. Masyarakat berperan dalam proses reintegrasi sosial dan penerimaan kembali para penerima manfaat ke lingkungan umum (Tamrin & Rifti, 2023).

Dalam pengelolaan rehabilitasi sosial, partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) adalah unsur penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program dan pencapaian tujuan jangka panjang, termasuk dalam usaha mengurangi ketimpangan ekonomi. Peran institusi pemerintah, terutama Dinas Sosial, sangat penting karena memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, mengalokasikan anggaran, dan mengawasi pelaksanaan program rehabilitasi sosial di tingkat daerah. Peran ini sesuai dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa keberhasilan penyediaan layanan sosial sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang miskin dan rentan secara terencana melalui cara-cara resmi (Sakawati, Azhari, & Sulmiah, 2023). Dalam konteks rehabilitasi sosial, peran ini meliputi penetapan standar layanan serta koordinasi antarinstansi yang melibatkan berbagai pihak, sehingga program pelaksanaannya dapat berlangsung dengan lebih teratur dan terukur.

Di samping itu, fungsi pendamping dan pekerja sosial dalam berinteraksi secara langsung dengan penerima manfaat juga merupakan fondasi penting bagi keberhasilan rehabilitasi sosial. Penelitian yang berdasarkan pada pengalaman mengenai peran pekerja sosial dalam program rehabilitasi menunjukkan bahwa pekerja sosial berperan sebagai penggerak, penghubung, penengah, perencana, dan pengelola yang secara langsung mendukung keberhasilan reintegrasi sosial para klien (Azzahroo, Susilowati, & Hambali, 2020). Penting untuk mencatat bahwa peran pendampingan tidak hanya sekadar memberikan arahan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung bagi penerima manfaat dalam mengembangkan keterampilan

sosial serta perilaku produktif yang mendukung kehidupan ekonomi mereka. Demikian pula, penelitian lain menunjukkan bahwa fungsi pendamping sosial dalam rehabilitasi sosial bagi anak-anak penyandang disabilitas memengaruhi penguatan jaringan kolaborasi serta pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan masyarakat, dengan dukungan dari berbagai elemen pemangku kepentingan seperti sektor swasta dan komunitas setempat (Muktiwibowo & Prayogi, 2022).

Bagian yang tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat sebagai pihak luar yang berkepentingan, terutama dalam mendukung proses reintegrasi sosial setelah rehabilitasi formal selesai dilaksanakan. Studi mengenai kerja sama dalam program rehabilitasi sosial menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bersama dengan badan pemerintah dan organisasi lain, seperti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan Baznas, dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sosial secara kolektif. Kerja sama semacam ini menunjukkan betapa pentingnya sinergi antara berbagai pihak, di mana setiap individu memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan mereka, baik dalam memberikan sumber daya, melakukan advokasi, maupun memberikan dukungan moral kepada penerima manfaat (Amalia & Rahmawati, 2024). Peran masyarakat juga melibatkan penguatan modal sosial melalui dukungan komunitas yang membantu individu mendapatkan akses ke peluang pekerjaan dan usaha setelah proses rehabilitasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada upaya pengurangan ketimpangan ekonomi pada tingkat mikro.

Keterlibatan pihak-pihak lain seperti lembaga non-pemerintah, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil juga memberikan kontribusi terhadap penguatan pengelolaan rehabilitasi sosial yang melibatkan partisipasi. Sebagai contoh, penelitian terapan mengenai pemulihan sosial-ekonomi setelah bencana alam menunjukkan bahwa kerjasama inklusif antara pemerintah dari berbagai level, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dapat mempercepat pemulihan sosial ekonomi di komunitas yang terdampak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberagaman peran para pemangku kepentingan saling mendukung dalam kerangka rehabilitasi sosial yang lebih luas (Rizqy & Anugrahini, 2024).

Penelitian lain juga menekankan bahwa penguatan jejaring kerja di panti sosial dan institusi rehabilitasi adalah aspek krusial untuk memperluas akses layanan, mengoptimalkan koordinasi antar lembaga, serta mengatasi keterbatasan tenaga kerja yang sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Menggunakan pemangku kepentingan dalam jaringan kerja ini memungkinkan terjadinya pertukaran sumber daya, informasi, dan dukungan yang memperkuat kesinambungan rehabilitasi sosial (Murni, 2016).

Oleh karena itu, manajemen rehabilitasi sosial yang efektif sebagai strategi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak saja. Partisipasi kolaboratif dari pemangku kepentingan yang mencakup lembaga pemerintah resmi (Dinas Sosial), pekerja sosial atau pendamping, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah adalah dasar yang krusial untuk memastikan bahwa intervensi rehabilitasi sosial tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam memperkuat

kemandirian ekonomi dan kapasitas sosial bagi penerima manfaat secara berkelanjutan.

Secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan fenomena keberfungsian sosial dan adaptasi sosial, yaitu kemampuan individu menyesuaikan diri dengan norma, peran, dan tuntutan lingkungan sosialnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial merupakan proses sosial yang berkelanjutan, bukan peristiwa sesaat, di mana keberhasilan jangka panjang sangat ditentukan oleh kesinambungan dukungan dari pemerintah, lembaga sosial, keluarga, dan masyarakat. Tanpa jejaring kerja yang kuat pada tahap pasca-rehabilitasi, individu cenderung mengalami kesulitan mempertahankan perubahan perilaku dan peran sosialnya, sehingga tujuan rehabilitasi sosial untuk mencapai kemandirian dan integrasi sosial yang berkelanjutan sulit terwujud. Hal ini sejalan dengan pendapat Amalia & Rahmawati, (2024), masih terdapat kekurangan, seperti kurangnya forum pertemuan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk memudahkan komunikasi dan pelaporan program. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dampak rehabilitasi sosial berpotensi tidak berkelanjutan apabila tidak didukung oleh mekanisme koordinasi yang kuat dan berkesinambungan. Tanpa adanya ruang komunikasi yang rutin antar *stakeholder*, program rehabilitasi sosial cenderung berjalan parsial dan berfokus pada hasil jangka pendek, sehingga tujuan jangka panjang berupa pemulihan dan kemandirian sosial penerima manfaat sulit tercapai secara optimal.

### ***Rehabilitasi Sosial sebagai Strategi Struktural Pengurangan Ketimpangan***

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, rehabilitasi diartikan sebagai upaya untuk mengembalikan seseorang ke posisi atau kondisi seperti sebelumnya. Dengan demikian, rehabilitasi merupakan suatu metode untuk memulihkan kondisi Penyandang Disabilitas yang dapat dilaksanakan melalui pendekatan fisik, mental, maupun sosial.

Menurut Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 2009, rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan fungsi dan pengembangan kemampuan yang bertujuan agar individu dapat menjalankan perannya dalam kehidupan bermasyarakat secara layak (UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Istilah rehabilitasi terdiri dari dua bagian kata, yaitu awalan "re" yang bermakna "kembali" dan kata dasar "habilitasi" yang berarti "kemampuan". Rehabilitasi sosial merupakan pendekatan intervensi sosial yang dirancang untuk membantu individu yang mengalami kerusakan fungsi sosial akibat ketimpangan struktural, seperti tunawisma, kecanduan, atau marginalisasi ekonomi (Nida Salsabila, Krisnani, & Apsari, 2018).

Rehabilitasi sosial tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kemampuan sosial individu yang mengalami masalah, tetapi juga memiliki potensi sebagai strategi struktural untuk mengurangi kesenjangan ekonomi jika difokuskan pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ekonomi para penerimanya. Secara teori, ketimpangan ekonomi muncul akibat adanya hambatan yang menghalangi kelompok rentan dalam mengakses sumber daya ekonomi, keterampilan, lapangan

---

kerja, modal, serta jaringan sosial yang solid. Dalam situasi ini, program rehabilitasi sosial yang dibuat secara menyeluruh dapat berfungsi sebagai alat yang mengubah keadaan, menciptakan jalur bagi kelompok masyarakat yang selama ini terabaikan agar mendapatkan akses yang lebih adil dalam sistem ekonomi nasional.

Salah satu cara pelaksanaan rehabilitasi sosial yang mencerminkan upaya pemberdayaan ekonomi adalah program yang direncanakan tidak hanya sebagai penyedia bantuan, tetapi juga sebagai penghubung dalam peningkatan keterampilan dan pembentukan jaringan sosial. Sebagai contoh, penelitian mengenai rehabilitasi sosial dalam memberdayakan perempuan yang rentan secara ekonomi di Kalimantan Selatan mengungkapkan bahwa intervensi sosial yang difokuskan pada peningkatan kemampuan serta pemberdayaan sosial-ekonomi peserta dapat menciptakan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan kemandirian dalam aspek ekonomi mereka setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kemampuan rehabilitasi sosial dalam menguatkan fondasi ekonomi penerima manfaat dapat dijadikan sebagai strategi dasar untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok tertentu melalui pemberdayaan secara berkelanjutan (Rarin & Purboningsih, 2025).

Selain itu, program rehabilitasi sosial yang berfokus pada komunitas juga terbukti berhasil dalam meningkatkan keterlibatan sosial dan kualitas hidup para peserta, yang merupakan salah satu elemen krusial dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Penelitian yang mengkaji program rehabilitasi berbasis komunitas untuk individu penyandang disabilitas di Kabupaten Karo menunjukkan bahwa metode partisipatif yang melibatkan keluarga, pemimpin masyarakat, dan organisasi lokal berperan dalam meningkatkan keterampilan, rasa percaya diri, dan hubungan sosial yang berdampak pada akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi bagi para peserta. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana rehabilitasi sosial dapat meningkatkan modal sosial yang mendukung mobilitas ekonomi kelompok yang rentan serta mengurangi pemisahan peluang ekonomi dalam masyarakat (Ginting, Manuhuruk, & Sitorus, 2025).

Pelaksanaan program rehabilitasi sosial di berbagai kota di Indonesia juga menekankan bahwa peningkatan pelayanan tidak hanya terfokus pada aspek perawatan saja, tetapi juga mencakup pembangunan kapasitas serta strategi pengembangan program untuk para penerima manfaat. Sebagai contoh, penerapan rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas di Makassar menunjukkan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh strategi pengembangan dan intervensi yang fokus pada pemberdayaan peserta agar mereka siap ikut serta dalam ekonomi lokal. Pendekatan ini menegaskan bahwa rehabilitasi sosial dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan penerima manfaat dengan kesempatan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Mutmainnah, 2023).

Implementasi rehabilitasi sosial sebagai strategi struktural umumnya mencakup layanan yang menyeluruh, mulai dari identifikasi kebutuhan dasar, pengembangan keterampilan, hingga proses reintegrasi ke dalam masyarakat. Berbagai kajian mengenai pelayanan rehabilitasi sosial menegaskan bahwa pendekatan yang holistik meliputi pelatihan vokasional, konseling psikososial, serta

---

sinergi lintas lembaga efektif dalam meningkatkan peluang pemulihan dan meminimalkan risiko terjadinya marginalisasi lanjutan. Model seperti ini tidak hanya berdampak pada pemulihan individu, tetapi juga mendorong keterlibatan sosial serta memperkuat jejaring komunitas, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi (Arganata & Nuranda, 2025).

Rehabilitasi sosial berbasis komunitas merupakan salah satu strategi struktural yang paling relevan dalam upaya mengurangi ketimpangan sosial, karena pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam proses pemulihan. Karakter inklusif dan partisipasinya memungkinkan solusi yang dihasilkan lebih kontekstual serta selaras dengan kebutuhan lokal. Ketika masyarakat dilibatkan secara langsung, proses rehabilitasi tidak hanya berdampak pada individu penerima manfaat, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan solidaritas kolektif. Berbagai studi mengenai program berbasis komunitas turut memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa integrasi sosial dan dukungan jaringan lokal mampu meminimalkan risiko disintegrasi sosial akibat ketimpangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan penerima manfaat menjadi kunci dalam memastikan rehabilitasi sosial memberikan dampak struktural yang berkelanjutan.

Pembaruan program rehabilitasi sosial melalui pelatihan, pendidikan, dan partisipasi masyarakat yang lebih luas sangat krusial dalam mengatasi ketidaksetaraan struktural. Sebagai contoh, penelitian terkait rehabilitasi komunitas di Cianjur menunjukkan bahwa usaha untuk meningkatkan kemampuan individu yang mengalami gangguan mental melibatkan pendekatan sosial yang berfokus pada komunitas, yang dapat memperbaiki aspek sosial, psikologis, dan ekonomi dari klien. Pendekatan yang berfokus pada komunitas ini menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial dapat meningkatkan akses ke berbagai sumber daya sosial yang sangat berkaitan dengan kemampuan individu untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan sosial yang lebih luas (Andayani, Jannah, Suheli, & Sofiani, 2023).

Secara keseluruhan, jika program rehabilitasi sosial dirancang dan dijalankan dengan strategi yang lebih menyeluruh yang mencakup peningkatan keterampilan kerja, jaringan sosial, pendampingan yang berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat, rehabilitasi sosial dapat berperan sebagai strategi struktural yang efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Pendekatan ini menganggap rehabilitasi sosial tidak hanya sebagai bantuan sementara, melainkan sebagai alat kebijakan yang memperkuat dasar ekonomi individu dan komunitas yang selama ini terpinggirkan dalam struktur ekonomi nasional.

## SIMPULAN

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan rehabilitasi sosial memainkan peran penting dalam usaha mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Efektivitas rehabilitasi sosial tidak hanya ditentukan oleh pemberian bantuan berupa barang atau uang, tetapi lebih kepada kemampuan program dalam meningkatkan kapasitas individu melalui

pengembangan keterampilan, pendampingan yang berkelanjutan, serta penguatan modal sosial dan budaya bagi penerima manfaat. Dengan demikian, rehabilitasi sosial yang fokus pada pemberdayaan dan produktivitas ekonomi terbukti lebih berhasil dibandingkan pendekatan yang bersifat konsumtif dan sementara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sosial sangat tergantung pada kerja sama di antara para pemangku kepentingan, yang meliputi pemerintah, organisasi penyedia layanan sosial, pekerja sosial atau pendamping, masyarakat, sektor swasta, serta lembaga non-pemerintah. Kerjasama di antara pihak-pihak tersebut merupakan faktor penting untuk menjamin kelangsungan program, meningkatkan akses terhadap kesempatan ekonomi, serta memperkuat proses reintegrasi sosial bagi penerima manfaat. Tanpa adanya koordinasi yang teratur dan berkelanjutan, pengaruh rehabilitasi sosial cenderung terbatas dan tidak dapat menciptakan perubahan yang bertahan lama bagi situasi ekonomi kelompok yang rentan.

Selain itu, rehabilitasi sosial dapat berfungsi sebagai strategi struktural untuk mengurangi ketimpangan ekonomi apabila dirancang secara menyeluruh dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Pendekatan yang melibatkan komunitas, pelatihan keterampilan, penguatan jaringan sosial, serta pendampingan yang mendalam adalah elemen-elemen krusial yang dapat mendorong mobilitas sosial dan meningkatkan kemandirian ekonomi bagi pihak yang menerima manfaat. Dengan demikian, rehabilitasi sosial tidak hanya berperan sebagai alat untuk mengembalikan fungsi sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang membantu menciptakan distribusi kesempatan ekonomi yang lebih adil.

Secara praktis, studi ini menunjukkan betapa pentingnya memperkuat tata kelola rehabilitasi sosial dengan meningkatkan kerjasama antar sektor, melakukan evaluasi program secara berkelanjutan, dan merumuskan kebijakan yang lebih inklusif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam rangka pengembangan pengetahuan, disarankan agar penelitian lebih lanjut menggunakan pendekatan empiris yang berbasis lapangan untuk mengukur secara kuantitatif pengaruh rehabilitasi sosial terhadap peningkatan pendapatan, mobilitas sosial, dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Melalui penguatan elemen konseptual dan empiris ini, rehabilitasi sosial diharapkan dapat beroperasi secara maksimal sebagai strategi yang terstruktur untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih adil di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alfatih, Sultan Rif'at, & Rahayu, Restu Karlina. (2025). Analisis Pemberdayaan Disabilitas Melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial ( ATENSI ) Kementerian Sosial RI Di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. *Journal of Governance and Policy*, 5(1), 1-20.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jgp.2025.01.1>
- Amalia, Risty, & Rahmawati, Rahmawati. (2024). Kolaborasi Stakeholder terhadap Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Cilegon.

- Pistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 5(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.57266/epistemik.v5i1.284>
- Andayani, Rini Hartini Rinda, Jannah, Roudhotul, Suheli, Akmal Rosadi, & Sofiani, Tiara Tri. (2023). Rehabilitasi Berbasis Masyarakat dalam Pemulihan Penyandang Disabilitas Mental di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 5(1), 15–28.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31595/rehsos.v5i1.823>
- Arganata, Donny Cahyo, & Nuranda, Muhammad Qaedi Rifqi. (2025). Intervensi Sosial Melalui Pelatihan Keterampilan Dan Konseling Sebagai Upaya Rehabilitasi Dan Reintegrasi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Tulungagung. *Central Publisher*, 3(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.60145/jcp.v3i2.601>
- Azzahroo, Siti Fatimah, Susilowati, Ellya, & Hambali, Emilia. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reintegrasi Korban Penyalahgunaan Napza Di Ipwl Bumi Kaheman Kabupaten Bandung. *Rehsos: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 2(2), 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.31595/rehsos.v2i2.311>
- Fitriani, Fitriani, Sari, Mita, & Arafat, Arafat. (2025). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Bagi Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya. *Anterior Jurnal*, 24(III), 71–75.
- Ginting, Monalisa, Manuhuruk, Muba, & Sitorus, Henri. (2025). Impact of Community based Rehabilitation Program among Persons with Disabilities in Suka Village , Karo Regency. *Journal of Social Interactions and Humanities (JSIH)*, 4(2), 649–660.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.55927/jsih.v4i2.335>
- Juhari, Ahmad, & Habibullah. (2025). Transformasi Layanan Rehabilitasi Sosial : Studi Kasus Kewirausahaan Atensi Sentra Wyata Guna di Bandung. *Sosio Konsepia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 14(2), 125–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/ska.v14i2.3416>
- Marlinda, Astrini, & Hati, Getar. (2015). Upaya Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 16(1). <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v16i1.1118>
- Muktiwibowo, Adityo, & Prayogi, Arditya. (2022). Peran Pekerja Sosial Masyarakat Dalam Memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kepada Anak Penyandang Disabilitas Berbasis Masyarakat. *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 21(1), 39–54.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31595/peksos.v21i1.533>
- Murni, Ruaida. (2016). Peran jejaring kerja dalam pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis di panti sosial bina karya pangudi luhur bekasi. *Sosio Konsepia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 5(2), 45–65.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33007/ska.v5i2.191>
- Mutmainnah. (2023). Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Education and Social Science*, 2(1), 34–43. <https://doi.org/10.56916/ijess.v2i1.392>

- Ningsih, Uci, Alpendi, & Dewi, Ambar Sari. (2024). *Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia : Penyebab , dampak, dan Solusi Kebijakan*. 5(November), 426–445. <https://doi.org/10.22373/jsai.v5i3.5577>
- Page, Matthew J., Mckenzie, Joanne E., Bossuyt, Patrick M., Boutron, Isabelle, Hoffmann, C., Mulrow, Cynthia D., Shamseer, Larissa, Tetzlaff, Jennifer M., Akl, Elie A., Brennan, Sue E., Chou, Roger, Glanville, Julie, Grimshaw, Jeremy M., Hróbjartsson, Asbjørn, Lalu, Manoj M., Li, Tianjing, Loder, Elizabeth W., Mayo-wilson, Evan, Mcdonald, Steve, Mcguinness, Luke A., Stewart, Lesley A., Thomas, James, Tricco, Andrea C., Welch, Vivian A., Whiting, Penny, & Moher, David. (2021). The PRISMA 2020 statement : an updated guideline for reporting systematic reviews Systematic reviews and Meta-Analyses. *Research Methods and Reporting*. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pratama, Inka Nusamuda, Saputra, Ajai, & Syaputra, Sigit Karma. (2025). Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan: Analisis Literatur Sistematis terhadap Perspektif Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer*, 5(1), 13–28.
- Rarin, Ghina Nur, & Purboningsih, Dewi. (2025). Empowerment of Socio-Economically Vulnerable Women ( WRSE ) through the Social Rehabilitation Program in South Kalimantan. *Journal of Social and Policy Issues*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.58835/jspi.v5i1.420>
- Rizqy, Dika Yudhistira, & Anugrahini, Triyanti. (2024). Keterlibatan Inklusif Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Collaborative Governance dalam Pemulihan Sosial-Ekonomi Penyintas Erupsi Gunung Sinabung. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 13(3), 253–268. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/ska.v13i3.3475>
- Rochmah, Putri Unzilatur. (2025). Strategi Dan Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Bagi Lansia Terlantar Oleh Dinas Sosial Sidoarjo. *Jurnal Publique*, 6(2), 199–210. <https://doi.org/10.15642/publique.2025.6.2.199-210>
- Sakawati, Herlina, Azhari, Megawati, & Sulmiah, Sulmiah. (2023). The Role Of Social Services In Improving The Welfare Of Poor Communities In Takalar District. *Jurnal Aktor*, 3(1), 69–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/aktor.v3i1.54710>
- Salsabila, Nazwa Winaya. (2025). Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi : Tinjauan dari Persepsi Mahasiswa dan Masyarakat. *Karimah Tauhid*, 4(8), 5507–5513. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i8.20134>
- Salsabila, Nida, Krisnani, Hetty, & Apsari, Nurliana Cipta. (2018). Rehabilitasi sosial bagi remaja dengan disabilitas sensorik. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 190–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20496>
- Sarjito, Aris. (2023). Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik & Humaniora*, 6(2), 1–12.
- Snyder, Hannah. (2019). Literature review as a research methodology : An overview

- and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(March), 333–339.  
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sobri, Fahdina Ajmala, Yaneri, Ahmad, & Kartika, Tuti. (2024). Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial ( Atensi ) Bagi Keluarga Miskin Melalui Warung Makan Indomie ( Warmindo ) Di Kota Bandung. *Rehsos: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 6(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31595/rehsos.v6i2.1372>
- Sucianti, Shinta Nur, Afandi, Muhamad Nur, & Kristian, Indra. (2024). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Pada Anak Terlantar Di Kota Bandung. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1), 136–145.
- Tamrin, Husni, & Rifti, Liliana. (2023). Analisis Stakeholder Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki Di Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Jawa Timur Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(2), 167–177. <https://doi.org/https://10.33701/jiwbp.v13i2.3598>
- Tarigan, Arlian Efrata, & Wibowo, Padmono. (2025). Analisis Peran Stakeholder Dalam Pembinaan Kemandirian Lapas Kelas IIA Binjai. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5628–5636.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2175>